

PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN BAGI ANAK USIA DINI DALAM MEWUJUDKAN WARGA NEGARA YANG BAIK

Oleh: Sigit Dwi Kusrahmadi

Abstrak

Michael Jackson merupakan gambaran anak yang mengalami kekerasan ketika masih kecil, menjelang remaja anak tersebut dipaksa menjadi mesin uang oleh keluarganya, dan di masa tuanya tidak mengalami kebahagiaan meskipun menjadi Raja Pop terkenal di seluruh dunia, dan hidup sangat kaya raya. Namun hidupnya tergantung dengan obat bius, bahkan sampai matinya (dalam usia 50 tahun) menunjukkan ketidakdewasaan sebagaimana manusia wajar. Michael Jackson berganti ganti wajah, pernah diseret ke pengadilan karena melakukan hubungan sex menyimpang dengan anak kecil, bahkan berganti- ganti agama. Gambaran di atas menunjukkan kehidupan manusia yang tidak berhasil, meskipun uangnya banyak tetapi kegagalan pada masa anak usia dini akan melahirkan kehidupan yang menyimpang.

Hetler seorang Penguasa Jerman pada masanya, menurut biografi kehidupannya masa kecil tidak bahagia. Hetler pernah dipermalukan di depan publik oleh rohaniawan karena melakukan kesalahan dalam upacara ritual keagamaan. Hitler dipukul dan diusir dari komunitasnya yang mengakibatkan sakit hati berkepanjangan, marah, dendam, dan pada masa dewasanya ketika menjadi orang nomor satu di Jerman, akhirnya menjadikan *monster* yang menakutkan anti sosial telah membunuh lebih dari 3 juta orang yahudi dan anti terhadap agama, menjerumuskan Jerman ke Perang Dunka ke II. Hal serupa dialami oleh pemimpin **Black Sabbath**, ketika masa kanak-kanaknya dilecehkan (mengalami kekerasan) sehingga sewaktu menjadi dewasa melakukan perbuatan anti sosial dan anti agama. Tulisan ini berusaha mencegah kekerasan terhadap anak usia dini agar kelak anak Indonesia menjadi manusia berguna bagi bangsa dan negara atau warga negara yang baik, manusia pendamai, tidak menjadi teroris membunuh sesama manusia.

Kata Kunci: Kekerasan terhadap anak usia dini

Pendahuluan

Kekerasan yang terjadi di Indonesia dari hari ke sehari angkanya semakin meningkat, kekerasan itu terjadi terhadap perempuan, anak usia dini, dan kekerasan biasanya lebih banyak dalam rumah tangga (KDRT). Data yang dilansir Komnas Perempuan paska diundangkan UU-PKDRT tahun 2004 menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu masalah kekerasan terhadap istri (KTI) tahun 2004 mencapai 1.782 kasus, sedang tahun 2005 terdapat 4.889 kasus, dan tahun 2007 mencapai 17.772 kasus dan angka tersebut cenderung meningkat (Kedaulatan Rakyat 29 Nov. 2008; 1).

Dalam peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dimulai tanggal 25 November 2008 sampai dengan 10 Desember 2008, hari AIDS 1 Desember dan hari Hak Azasi Manusia (HAM) jatuh pada tanggal 10 Desember masih terdapat kekerasan masif, dan agaknya bangsa ini perlu meratifikasi kembali pelbagai kekerasan yang terjadi di Indonesia. Kekerasan virtual juga disuguhkan di layar TV melalui filem anak-anak seperti *Naruto*, *Avatar* dan media elektronika melalui komputer, *game onliene* dan tersosialisasi pada anak-anak. Akibatnya anak-anak usia dini akrab dengan kekerasan dan mengimplementasikan dalam bentuk perilaku yang destruktif. Melalui Pendidikan anti kekerasan diharapkan dapat memberikan secercah harapan agar generasi muda khususnya anak-anak usia dini menjadi warga negara yang baik, cinta damai mengasihi sesama mengabdikan diri pada anti kekerasan.

Secara historis kekerasan sudah ada sejak manusia menghuni planet bumi, kekerasan pertama dilakukan oleh Kain terhadap adiknya Habil karena iri hati, kekerasan terus berlangsung hingga penyalipan, pembunuhan Isa Almasih di awal abad pertama. Kekerasan terjadi dimana-mana, peperangan antar bangsa; Perang Dunia I, Perang Dunia ke II, Perang Kemerdekaan RI, bahkan sampai awal Abad 21 peperangan dan kekerasan (terorisme) masih berlangsung yang menimbulkan penderitaan dimana-mana. **Manusia tidak mau belajar sejarah, pada hal sejarah merupakan guru kehidupan**, supaya manusia tidak melakukan kesalahan atau kebodohan yang sama berbuat kekerasan terhadap sesamanya.

Kekerasan berlangsung di seluruh dunia, dampak globalisasi dan modernisasi memberi kontribusi terhadap perkembangan kekerasan yang dilakukan manusia. Bahkan perkembangan dari masyarakat nomaden, petani, industri, hingga ke masyarakat zaman revolusi komunikasi telah menunjukkan peningkatan kualitas dan kuantitas kekerasan. Adanya perkembangan media cetak, media elektornika, secara tidak langsung telah mempertontonkan budaya kekerasan, pornografi, filem-filem tidak mendidik seperti fiksi-fiksi; *Power Rengers*, *Superman*, *Sinchan*, *Avatar*, *Naruto* telah memberi kontribusi terhadap kekerasan.

Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat bersifat masif, di salah satu kota Kabupaten Kebumen, Jateng terdapat 93 kasus kekerasan; terdiri dari 49 kasus kekerasan terhadap orang dewasa dan 44 kasus kekerasan terhadap anak-anak termasuk anak usia

dini. Kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya tidak dilaporkan karena dapat berbuntut panjang, sehingga bagaikan gunung es, yang hanya sebagian terungkap dan sedikit yang dilaporkan. Oleh karena itu untuk mengatasinya Pemerintah Indonesia telah membentuk Tim Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PKKPA) dan Tim terpadu (Kedaulatan Rakyat, 18 April 2008: 18).

Kekerasan terhadap anak terjadi karena keluarga yang kurang harmonis, konflik dalam keluarga, sehingga anak menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Di Jakarta ada seorang anak balita yang kakinya dilindaskan ke kereta api yang sedang melaju, akibatnya salah satu kakinya putus, hanya akibat konflik antara suami dan istri, anak dijadikan korban kekerasan. Hal yang sama terjadi di Purwokerto, orang tua yang tega membunuh anaknya yang masih balita, karena permasalahan yang tidak prinsip dan anak disiksa hingga mati. Masih banyak anak-anak Indonesia usia dini yang diterlantarkan orang tuanya baik karena kurang gisi, orang tua kawin cerai dan banyak anak-anak usia dini kurang diberdayakan; digali potensinya (talentanya), diasah kecerdasannya dan dipersiapkan menjadi warga negara yang baik.

Pengertian Kekerasan

Secara umum pengertian kekerasan didefinisikan suatu tindakan yang dilakukan suatu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Kekerasan anak usia dini adalah kekerasan terhadap individu yang belum dewasa, termasuk yang ada di dalam kandungan ibunya. Perlakuan tindakan semena-mena terhadap anak biasanya dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga atau melindungi anak (*care taker*) pada seorang anak. Kekerasan biasanya dilakukan pada anak baik secara fisik, mental, seksual atau emosi. Pelaku kekerasan pada umumnya bertindak sebagai pelindung, yang seharusnya memprotek terhadap kehidupan anak, dan kekerasan dilakukan oleh orang terdekat. Biasanya dilakukan oleh ibu kandung, bapak kandung, bapak tiri, ibu tiri, kakek, nenek, paman, tante, supir pribadi, pembantu, tukang ojek, tukang kebun, kakak kelas (Yayan Akkhyar, 2008: 1).

Kekerasan menurut Simon Fisher yang dikutip Neneng (2008; 1) "kekerasan adalah tindakan, perkataan, sikap berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, sosial, atau lingkungan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensi

secara penuh.” Saat ini kekerasan dalam kehidupan sehari-hari hampir diidentikkan dengan perkelahian, benturan fisik. Kekerasan bukan hanya berwujud benturan fisik tetapi bisa diwujudkan dalam perkataan, tindakan, sikap manusia dapat dikategorikan kekerasan.

Menurut Iqbal Djayadi, Sosolog UI yang dikutip Sumarsih (2008; 3) ” Kekerasan secara umum dapat merujuk kepada tindakan untuk mengurangi atau meniadakan eksistensi manusia lain. Ada dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individual dan berorientasi sepenuhnya pada individu, dan secara umum jenis ini merujuk pada kriminalitas. Tercakup di dalamnya tindakan penganiayaan dan pembunuhan, baik dilakukan untuk mengambil harta maupun nyawa orang lain. Kedua adalah kekerasan yang dilakukan secara kolektif, baik pelaku maupun orientasi hasilnya adalah kelompok bukan individu.

Kamus besar Bahasa Indonesia, kekerasan diterjemahkan tindakan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau kerusakan fisik. Kekerasan adalah sebagai upaya seseorang atau kelompok untuk meniadakan atau menguasai kelompok lain terhadap seluruh hidupnya, dilakukan bertentangan dengan nilai moral dan norma hukum. Akibat tindakan kekerasan adalah seseorang atau kelompok, bisa kehilangan nyawa, harta, kesusakan fisik (terluka dan cedera) atau kehilangan semuanya.

Kekerasan anak adalah kekerasan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang lebih muda, dengan memanfaatkan kekuasaannya atau otoritasnya. Biasanya anak ada dibawah kekuasaannya dan kekerasan ini dapat menyebabkan penderitaan fisik, kesengsaraan, cacat seumur hidup, penganiayaan seksual, maupun penganiayaan emosional. Pada tahun 1998 di Amerika Serikat terdapat 1100 anak meninggal. Atau rata-rata 3 orang anak meninggal setiap hari akibat kekerasan; dari 2,8 juta kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada Agensi Perlindungan anak. Berdasarkan bentuk kekerasannya; 53,5% kasus kekerasan akibat anak yang diterlantarkan, 22,7% kasus akibat kekerasan fisik, 11,5% akibat kekerasan seksual, 6% akibat kekerasan emosi, dan 6% akibat penelantaran medis (Google, Kekerasan, 2008).

Pelanggaran Hak anak dalam bentuk kekerasan di Indonesia juga angkanya cukup tinggi, catatan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) dari tahun 2007 sampai

dengan tahun 2008, kualitasnya mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2008 pelanggaran hak anak berjumlah 26.901.627 kasus, terdiri dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan mempekerjakan anak di bawah umur. Tahun 2008 kualitas pelanggaran hak anak terpantau semakin menguatirkan dan sangat kompleks (Seto Mulyadi, 2008: 3). Dalam kekerasan terhadap anak pelakunya sangat beragam, bahkan mengakibatkan kematian seperti aborsi. Pelaku biasanya membuang hasil aborsi ke tempat sampah, menenggelamkan ke dalam sungai dengan memberi pemberat batu. Kekerasan terhadap anak dengan meracuni dilakukan dengan alasan karena himpitan ekonomi.

Kekerasan dalam **bidang pendidikan**, khususnya anak usia dini biasanya dilakukan guru taman kanak-kanak (TK) terhadap anak asuhnya yang tidak menurut pada perintah guru. Guru TK biasanya menekan (*pressure*) anak dengan membujuk secara halus agar menurut, menakut-nakuti, menjewer, mencubit anak yang dianggap bandel. Menjewer telinga, mencubit lengan tangan, dan paha anak, meskipun dianggap konvensional masa dahulu dianggap wajar, namun cara ini sekarang berusaha untuk dihindari. Kekerasan yang lebih sering terjadi justru oleh sesama anak TK (anak usia dini), ketika berebut permainan atau saling mengejek (Harian Jogja, 15 Agustus 2009) bisa terjadi kekerasan antar anak usia dini yang kurang pengawasan oleh pengasuhnya.

Komnas Perlindungan Anak (PA) juga memperhatikan ada intensifitas peningkatan kekerasan di dunia pendidikan pada tahun 2008, baik yang dilakukan tenaga pendidik terhadap muridnya, maupun kekerasan yang dilakukan senior di TK terhadap juniornya. Kenaikan peningkatan kekerasan terhadap anak usia dini diprediksi akan semakin meningkat baik tidak dilaporkan maupun dilaporkan, yang terpantau Komnas PA akibat krisis ekonomi (Seto Mulyadi, 2008: 3).

Pendidikan Anti Kekerasan Anak Usia Dini

Istilah pendidikan berasal dari kata *paedagogi*, dalam bahasa Yunani *pae* artinya anak dan *ego* artinya aku membimbing. Secara harafiah pendidikan berarti aku membimbing anak, sedang tugas pembimbing adalah membimbing anak agar menjadi dewasa. Pendidikan merupakan suatu upaya mengembangkan atau mengaktualisasikan seluruh potensi kemanusiaan ke taraf yang lebih baik dan lebih sempurna (Lutfi Wibawo, 2009: 13). Secara singkat Driyarkara yang dikutip oleh Istiqomah mengatakan

bahwa pendidikan adalah suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui bimbingan atau pengajaran dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila dan dinamis (Istiqomah, 203: 7). Sedang hakekat Anti Kekerasan adalah mensosialisasikan nilai-nilai, norma-norma tingkah laku manusia yang harus dan wajib dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang mengedepan nilai-nilai musyawarah dan perdamaian dan menghindari kekerasan.

Dalam mensosialisasikan nilai moral perlu adanya komitmen para elit politik, tokoh masyarakat, guru, *stakeholders* pendidikan Anti kekerasan, dan seluruh masyarakat. Sosialisasi Pendidikan anti kekerasan harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:

“Pendidikan Anti kekerasan adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara komperhensif, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya. Pelatihan pendidikan anti kekerasan perlu diadakan bagi kepala sekolah, guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan komunitas pemimpin yang merupakan esensial utama. Perlu perhatian terhadap latar belakang murid yang terlibat dalam proses kehidupan yang utuh. Perhatian pendidikan anti kekerasan harus berlangsung cukup lama, dan pembelajaran anti kekerasan harus diintegrasikan dalam kurikulum secara praksis di sekolah dan masyarakat (Setyo Raharjo, 2002; 28).

Pendidikan Anti kekerasan harus direncanakan secara matang oleh *stakeholders* , sebagai *think-tank*, baik para pakar Anti kekerasan (Komnas HAM Anak) seperti rohaniawan (tokoh agama), pemimpin non formal (tokoh masyarakat), kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid. Pendidikan anti kekerasan ini harus memperhatikan nilai-nilai secara holistik dan uiniversal. Keberhasilan pendidikan anti kekerasan dengan keluaran menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan kompetensi sosial yang moralis (anti kekerasan) dan dinamis sehingga menghasilkan warga negara yang baik (*good citizen*). Kesuksesan pendidikan Anti kekerasan tidak diukur dengan penguasaan nilai-nilai anti diskriminasi dan inklusifisme serta *soft skils* yaitu kemampuan bekerja kelompok secara **inklusif** (mudah menerima masukan) anti diskriminasi, egalitarian, memimpin secara demokratis, kemampuan berkoordinasi, humanis, menghargai pluralisme, kemampuan berkomunikasi, tabah dan gigih, percaya diri, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan tekonologi informasi, tidak banyak

tuntutan dan memiliki nilai-nilai wawasan perdamaian untuk mewujudkan kehidupan anti kekerasan (Sofian, Kedaulatan Rakyat, 19 Agustus 2005).

Dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti kekerasan pemimpin formal dan non formal bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang penuh perdamaian dan kasih sayang terhadap sesama yang diwujudkan baik dalam ranah organisasi negara (*state*), organisasi masyarakat (*civil state*), ranah istitusi dunia usaha (*market institution*). Semua pejabat negara, pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab menjadikan jabatannya sebagai media pembelajaran pendidikan Anti kekerasan

Dalam mewujudkan kehidupan anti kekerasan untuk mewujudkan masyarakat sipil perlu strategi perjuangan secara struktural dan kultural secara bersama-sama. Strategi struktural dalam arti politik, perbaikan struktural ini merupakan sarana yang paling efektif adalah melalui partai politik. Melalui lembaga partai politik aspirasi masyarakat dapat disalurkan tentang pendidikan anti kekerasan akan diperjuangkan sebagai masukan dari infrastruktur politik kepada suprastuktur politik. Input dari infrastruktur politik kepada suprastruktur politik akan dijabarkan dalam bentuk kebijaksanaan atau undang-undang yang mewajibkan dilaksanakannya pendidikan Anti Kekerasan bagi generasi penerus yang didukung dana dari pemerintah. Sementara secara kultural memerlukan perjuangan yang panjang. Perjuangan membangun mentalitas bangsa melalui nilai-nilai keadilan demokrasi dan mengandung nilai anti kekerasan, harus diawali dari individu yang mengutamakan kehidupan yang menjunjung nilai-nilai anti kekerasan, disemaikan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat luas sebagai implementasi keteladanan anti kekerasan.

Dalam mensosialisasikan nilai-nilai Anti kekerasan diperlukan pemimpin atau pendekar, pejuang Anti kekerasan yang tidak pernah gentar, putus asa atau frustrasi meskipun rintangan, halangan, lingkungan tidak kondusif, dan harus berhadapan dengan kekuasaan yang cenderung menggunakan kekerasan. Dengan tidak jemu-jemu meneriakan sosialisasi pendidikan Anti kekerasan untuk mewujudkan nilai anti kekerasan secara universal.

Pendekar anti kekerasan *pertama*; **harus yakin sungguh-sungguh yakin atau seyakin-yakinnya (percaya sungguh-sungguh percaya)** bahwa nilai-nilai anti kekerasan **bisa dan harus disosialisasikan** dengan sungguh-sungguh pada peserta didik

sehingga peserta didik mengerti dan melaksanakan nilai-nilai anti kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*; pemimpin (pendekar anti kekerasan) harus berfikir **sungguh-sungguh berfikir** tidak pernah putus asa dan kehilangan akal untuk mencari solusi dalam pendidikan anti kekerasan demi perbaikan moral peserta didik. *Ketiga*; pendekar anti kekerasan **harus berusaha sungguh berusaha** untuk mewujudkan **kehidupan anti kekerasan yang baik** dalam masyarakat. Pemimpin anti kekerasan harus bersedia bersinergis dengan pemimpin lain untuk mewujudkan kehidupan yang damai, baik dengan menggunakan konsep *gold three angle* yaitu kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah dan penyandang dana. Perguruan tinggi mengadakan R dan D (*research & development*) dalam bidang pendidikan anti kekerasan yang telah diujicobakan dan berhasil. Pemerintah termasuk pemimpin nasional yang memberi *good will* (kemudahan) melalui peraturan pemerintah dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti kekerasan. Penyandang dana bisa dari *grand* (hadiah) atau donatur, hibah untuk mendanai riset dan sosialisasi nilai anti kekerasan sehingga pendidikan anti kekerasan bisa berjalan dengan baik seperti harapan.

Hasil riset perguruan tinggi diharapkan menambah alternatif pemerintah yang dapat dipilih sebelum menentukan kebijakan dilaksanakan, selain itu tenaga dosen bersama mahasiswa dapat mendampingi masyarakat, sehingga perguruan tinggi dapat menjadi solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa khususnya dalam memecahkan **persoalan kekerasan dalam kehidupan berbangsa**. Mereka bisa bersinergis dan tidak saling menyalahkan, pakar-pakar perguruan tinggi dapat memberi masukan pada pemerintah dan sekaligus terjun langsung ke masyarakat dengan langkah kongkrit untuk memperbaiki kehidupan bangsa dalam mewujudkan anti kekerasan (Victor Purba, Kompas; Kamis, 22 Maret 2007; 12).

Jadi nilai anti kekerasan harus dibawa seorang pakar anti kekerasan yang meyakini kebenaran perdamaian sebagai ideologi ideal harus ditanamkan pada setiap hati (personal, individu) agar suatu hari nanti kehidupan bangsa yang anti kekerasan pasti terwujud.

Dengan adanya benih nilai-nilai anti kekerasan yang sudah disemaikan dalam keluarga, diajarkan di sekolah oleh guru dan masyarakat diharapkan setiap personal dapat mempraktikkan nilai perdamaian (anti kekerasan), kasih terhadap sesama dalam

totalitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Modal nilai perdamaian dan kasih yang sudah ada dalam personal merupakan lahan yang subur bagi generasi penerus untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*). Terlebih lagi dalam pembelajaran dan sosialisasi pendidikan perdamaian (anti kekerasan) dapat dimanfaatkan konsep *learning to do, learning to be, learning to know, learning to live together*. Pengertiannya dalam pembelajaran anti kekerasan peserta didik diajak melakukan bersama-sama, pendidikan merupakan proses menjadi dewasa, sempurna sesuai dengan tujuannya, pendidikan anti kekerasan dilaksanakan saat ini, dan pendidikan anti kekerasan dilakukan bersama-sama dalam kehidupan masyarakat sehingga pendidikan antara di sekolah, rumah dan masyarakat saling mendukung untuk membentuk kehidupan yang lebih damai (anti kekerasan). Apalagi guru, orang tua murid, pemuka agama, pemuka masyarakat, elit politik, dan pejabat (pemimpin nasional) memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dengan konsep “*Ingarso sung tuladho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani*” artinya seorang pemimpin yang baik bisa memberi keteladanan atau menjadi panutan bagi yang dipimpinnya, ditengah-tengah lingkungannya menjadi penggerak untuk mencapai tujuan, sedang jika dibelakang memberi dorongan, petunjuk atau memberi motivasi bagi yang dipimpinnya sehingga sasarannya dapat dicapai. Konsep pendidikan anti kekerasan di atas tidak hanya sebagai wacana tetapi harus diaktualisasikan ke dalam kehidupan nyata, sehingga pendidikan anti kekerasan bisa mewujudkan masyarakat sipil yang dicita-citakan.

Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam pendidikan lebih lanjut. Malik Fajar mengatakan bahwa pengembangan SDM sejak dini merupakan langkah strategis, karena usia dini merupakan usia yang sangat menentukan bagi tumbuh kembang seluruh potensi anak yang akan digunakan dalam kehidupan selanjutnya (Djuwalman, 2009; 11).

Anak usia dini secara anatomis sedang dalam pertumbuhan baik fisik dan mentalnya. Pertumbuhan saraf otaknya dimulai sejak dalam kandungan, dan ketika lahir sel saraf otak terus berkembang. Teori mengatakan, sampai usia 4 tahun 50% kecerdasan telah tercapai, dan 80% kecerdasan tercapai pada usia 8 tahun (Slamet Suyanto, 2005: 7).

Menurut Slamet Suyanto dalam makalahnya "*Prinsip-prinsip Pembelajaran Anak usia dini*" mengatakan bahwa PAUD merupakan ilmu yang bersifat interdisipiner, meliputi; Pendidikan anak usia dini, Psikologi perkembangan anak, Biologi perkembangan, *Neoroscience*, Pendidikan jasmani, Pendidikan bahasa dan seni, dan pendidikan bidang studi termasuk **pendidikan anti kekerasan** (Slamat Suyanto, 2006: 1). Sedang prinsip-prinsip dalam proses belajar mengajar dalam PAUD antara lain; *Appropriate* yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan tumbuh kembang jiwa anak, esensi bermain, holistik atau menyeluruh, terpadu atau *integrated*, bermakna, *long life skills* dan fleksibel

Anak usia dini mempunyai batasan dan pengertian beragam, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Secara tradisional pemahaman tentang anak usia dini sering disamakan dengan manusia dewasa dalam bentuk mini, masih polos dan belum mampu berfikir luas. Akibatnya anak usia dini sering diperlakukan sebagai orang dewasa kecil. Namun dalam perkembangan kemudian, ternyata anak usia dini berbeda dengan orang dewasa, sehingga diperlukan pendidikan secara khusus bagi anak usia dini sesuai dengan pertumbuhan fisik, emosional, kejiwaan dan **anti kekerasan** (Sofia Hartati, 2005: 7).

PAUD sangat penting karena akan membantu perkembangan anak baik fisik, intelektual, sosial maupun emosional. Pendidikan pra sekolah juga dapat meningkatkan kemampuan anak untuk berkomunikasi dan mengekspresikan kebutuhan dan keinginannya. Pengembangan anak usia dini merupakan pilihan yang bijaksana dengan pengembangan SDM guna membangun manusia masa depan. Menurut Young (Syarief, 2002: 11) ada 5 alasan pengint melakukan investasi untuk anak usia dini al.; (1) Untuk membangun SDM yang berkemampuan intelegesi tinggi, berkepribadian dan perilaku sosial yang baik serta mempunyai ketahanan mental, dan psikososial yang kokoh. (2) Menghasilkan pertambahan ekonomi, dan mengurangi biaya ekonomi di masa yang akan datang dan meningkatkan efektifitas pendidikan dan menekan pengeluaran biaya untuk

kesejahteraan rakyat. (3) Untuk mencapai pemerataan sosial ekonomi masyarakat termasuk kesenjangan antar gender. (4) Meningkatkan efisensi investasi pada sektor lain karena intervensi program gizi dan kesehatan anak akan meningkatkan kinerja dan mengurangi kemungkinan tinggal kelas.

Anak usia dini mengalami perkembangan fisik dan motorik, tak kecuali perkembangan kepribadian, watak, emosional, intelektual, bahasa, dan moralnya yang bertumbuh dengan pesat. Oleh karena itu usia dini disebut sebagai *golden age* (usia 0-8 tahun). Oleh karena itu jika menghendaki bangsa yang cerdas, dan **anti kekerasan** pendidikan harus dimulai sejak usia dini.

PAUD sebagai gerbang pertama disamping pendidikan keluarga, diharapkan mampu meletakkan dasar-dasar yang kokoh sebagai persiapan pendidikan dan kehidupan selanjutnya. Hal ini berarti dalam menengani anak usia dini yang mencakup pola pertumbuhan dan perkembangan merupakan bagian yang sangat penting dalam PAUD. Hurloc (1978; 22) pengetahuan tentang perkembangan anak membantu guru untuk mengetahui apa yang diharapkan anak, pada usia berapa diharapkan munculnya pengetahuan berbagai pola tingkah laku, dan kapan pola ini dapat diganti lebih matang. Hal ini penting karena terlalu banyak yang diharapkan pada usia tertentu akan mengakibatkan anak merasa tidak mampu bila tidak mencapai standar, dan mereka akan kehilangan rangsangan untuk mengembangkan kemampuannya sehingga potensi anak tidak berkembang secara optimal (Djuwalman, 2009; 12).

Dalam usaha mentransfer nilai-nilai anti kekerasan dapat digunakan **pendekatan dan metode** pembelajaran yang tepat sesuai dengan tumbuh kembang jiwa anak usia dini. Menurut Habibah (Habibah, 2007: 1) dalam sosialisasi pendidikan **anti kekerasan** dapat digunakan pendekatan **indoktrinasi, klasifikasi nilai, keteladanan, dan perilaku guru**. Keempat pendekatan tersebut di atas diharapkan dapat diterapkan sesuai dengan situasi kondisi serta dilakukan secara holistik sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. Pendekatan di atas juga diharapkan guru mengetahui karakteristik siswa maupun kondisi kelas, dan seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan psikologi pendidikan sehingga kelas kondusif untuk pembelajaran **anti kekerasan** (Sri Rumini, 1995: 19-20).

Pendekatan indoktrinasi dengan cara memberi hadiah atau hukuman, peringatan, dan pengendalian fisik. Sedang pendekatan klasifikasi nilai anti kekerasan, dengan cara penalaran dan ketrampilan. Pendekatan keteladanan dengan cara disiplin, tanggung jawab, empati, dan pendekatan pembiasaan dengan cara perilaku seperti berdoa, berterima kasih. Pendekatan habitus diharapkan dapat merubah perilaku aanti kekerasan anak usia dini (Ambarwati, 2007: 1).

Sedang dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti kekrasan dapat digunakan metode bercerita (mendongeng), baik secara langsung, menggunakan ilustrasi, menggunakan papan panel, media boneka, Audio visual, Sosio drama. Metode bercerita khususnya menggunakan “dongeng” sangatlah menarik karena alur cerita, tujuan cerita, puncak cerita dan akhir cerita dapat direncanakan sehingga tujuan pembelajaran anti kekerasan lebih terarah dan terfokus untuk membentuk perilaku yang baik. Metode lain yang bisa digunakan antara lain; metode karya wisata, bermain yang berkaitan dengan menggunakan media seni rupa, seni musik sekaligus sebagai sarana untuk dapat membentuk perkembangan emosi dan kepribadian yang bermuatan anti kekerasan. Jadi pendidikan anti kekerasan harus dilakukan dengan pendekatan holistik dan terfokus untuk membentuk warga negara yang baik

Penutup

Kekerasan terhadap anak usia dini dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan karena akan mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Perdamaian di dunia tidak akan terwujud, jika produksi dan reporduksi kekerasan menjadi solusi dalam menjawab perbedaan-perbedaan. Porsoalan–persoalan yang terdjadi di dunia diselesaikan dengan kekerasan maka akan timbul reaksi balik berupa kekerasan yang dilestarikan, sehingga kekerasan dalam pendidikan tidak pernah berhenti.

Secara sosologis kekerasan dalam dunia pendidikan tidak melekat dalam nalar dan tidak terbangun sebagai konstruks kehidupan manusia. Benih-benih kekerasan dan pragmatisme kemungkinan terjadi sebagai fakta makin minimnya ruang-ruang refleksi untuk beritolerasnsi dalam perbedaan. Banyak anlisis makin minimnya ikatan-ikatan sosial dalam komunitas, serta perubahan sosial yang menyesakkan arena bersama dalam bertukar pikiran dan kian menyusutnya interaksi dalam perbedaan. Dalam situasi seperti

ini penyempitan makna perbedaan semakin subur yang diperkuat oleh arogansi dan doktrin sebagai panglima yang tidak memberi ruang dialog dalam perbedaan.

Tantangan besar untuk mengkonstruksi ulang pendidikan anti kekerasan anak usia dini yang mengharapkan perdamaian dalam perbedaan. Tradisi masyarakat untuk berdialog anti kekerasan dalam pendidikan dan tidak saling menutup diri dalam struktur masyarakat yang inklusif sebagai penghubung perbedaan. Dalam masyarakat *grassroot* sebenarnya banyak nilai-nilai, sikap dan tindakan yang cukup cair dan toleran anti kekerasan. Kultur semacam ini harus diangkat dan dipresentasikan dalam berbagai arena perdebatan atas ekpose di berbagai media publik khususnya pendidikan yang berbasis masyarakat. Perlu disosialisasikan gerakan *non-violence* dan toleransi untuk kemanusiaan dalam wilayah masyarakat kampus, maka hal ini akan membangun pendidikan anti kekerasan dalam mewujudkan komunitas kehidupan kampus yang damai (Kedaulatan Rakyat, 13 Agustus 2009; 28).

Kekerasan terjadi disebabkan karena lingkungan yang tidak kondusif, sehingga menimbulkan *depresi*, *stress* yang berat, ada kecenderungan melakukan tindakan tidak terkontrol dan dapat melakukan kekerasan terhadap orang lain maupun diri sendiri; Faktor penyebab *stress* sangat kompleks, dari masalah ekonomi, harapan yang tidak terwujud, lingkungan yang keras dan kompetitif, kurangnya nilai agama yang diimplementasikan dalam hidup akan melahirkan terorisme.

Sosialisasi nilai-nilai anti kekerasan harus diberikan kepada anak usia dini, karena anak usia dini sebagai generasi penerus kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Pendidikan anti kekerasan bisa disosialisasikan melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, dan akan lebih efektif lagi jika melalui peraturan formal, dan para guru wajib mengintegrasikan dalam mata pelajaran sekaligus memberi keteladanan anti kekerasan. Pemerintah sebagai lembaga formal juga wajib menyensor tayangan TV yang menampilkan gambar-gambar atau cerita yang mengakomodasikan kekerasan.

Pendidikan Anti kekerasan diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan sosial sehingga menjadi warga negara yang baik (*good care* atau *good citizen*) dengan ciri-cirinya antara lain: berani mengambil sikap positif untuk menegakkan norma-norma sosial anti kekerasan, membuat aturan hukum yang kondusif untuk kebaikan dan nilai-nilai moral anti kekerasan demi masa depan bangsa yang mengedepankan

nilai-nilai anti kekerasan, anti diskriminasi, inklusifisme, humanisme, pluralisme, kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesatuan, kebangsaan, kebhinekaan, multikultural, nasionalisme, demokrasi dan demokratisasi yang bersumber pada nilai anti kekerasan sebagai paradigmanya..

Pendidikan anti kekerasan pada anak usia dini diharapkan dilakukan secara humanis artinya memperhatikan potensi awal (talenta, karakter, watak) yang diberikan Tuhan, potensi inilah yang dikembangkan untuk bekal hidup saling mengasihi, saling memberi, saling menerima, berimpati. Materi diberikan bukan dengan paksaan (anti kekerasan) melainkan saling mengisi, saling menghargai sehingga terwujud pendidikan anti kekerasan dan perdamaian.

Diberikannya pendidikan Anti kekerasan pada anak usia dini merupakan salah satu alternatif solusi penyelesaian untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan dalam masyarakat Indonesia. Dengan tersosialisasikan pendidikan anti kekerasan diharapkan generasi penerus dapat memahami, menganalisis, menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat yang berhubungan dengan kekerasan dan dapat membangun kehidupan anti kekerasan secara berkesinambungan, konsisten yang bersumber pada nilai-nilai moral Pancasila sehingga cita-cita bangsa dapat terwujud perdamaian abadi anti kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mallarangeng, 2000. *Otonomi Daerah Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Forum Komunikasi Keluarga Rokan Hulu.
- Bobbi DePorter & Mike Hernacki, 2003. *Pembelajaran yang menyenangkan*. Jakarta. Gramedia.
- Budi Istanto, 2007. *Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Generasi Penerus*. Yogyakarta: FIP. UNY.
- Djuwalman, 2009. "Peranan Orang tua dalam PAUD". *Pelangi Pendidikan*, Majalah Ilmiah Pendidikan, Volume IX, Nomor 2 Januari 2009.
- Eomi Toufiqoh, 2007. *Pentingnya Pendidikan Moral*, Yogyakarta: FBS, UNY.
- Ignas Kleden. 2003: *Demokrasi "Demokrasi dan Distorsinya: Politik Reformasi di Indonesia"*. *Google*.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Fakultas Filsafat UGM.
- LAI, 2003, *Alkitab*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Lutfi Wibawo, 2009. " *Fondasi Pendidikan*". *Educinfo*, Media komunikasi FIP UNY. Vol. V No. 3 Mei-Juni 2009.
- Seputar Indonesia, *Pelanggaran Hak Anak Meningkat* , Senin 29 Desember 2008.
- Slamet Suyanto, 2006. *Pendidikan Anak SD*.
- Umar Said, 2007. *Google Pendidikan Moral*
- Verkulyl. J. 1985. *Etika Kristen*, Jakarta. BPK.

Sumber Televisi

Metro TV, 17 Januari 2009.

Sandra, TV 7, Senin 6 April 2000, Tentang Kekerasan dalam Kehidupan Masyarakat.

Seputar Indonesia, *Pelanggaran Hak Anak Meningkat*, Senin 29 Desember 2008

Surat Kabar

A. Safei Maarif, Kompas, 7 Maret 2007.

Haedhar Nashir, "Leptop Dewan". *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 23 Maret 2007.

Kedaulatan Rakyat 29 Nov. 2008.

Kedaulatan Rakyat, 18 April 2008.

Sofian, *Kedaulatan Rakyat*, 19 Agustus 2005.

Victor Purba, "UI Siap Melangkah Lebih Kongkrit", *Kompas*, Jakarta, 23 Maret 2007.

Internet

Ambarwati, 2007. Kekerasan

Google, Anti Kekerasan, 2009

Yayan Akkhyar, Anti Kekerasan. 2008.

Neneng. Anti Kekerasan. 2009.

Seto Mulyadi, Anti Kekerasan terhadap Anak. 2008

Sumarsih. Kekerasan. 2008.

Biodata Penulis:

Sigit Dwi Kusrahmadi, lahir di Yogyakarta, 27 Juni 1957, menyelesaikan S-1 di Fakultas Sastra Jurusan Sejarah UGM, dan menyelesaikan S-2 Sospol Ketahanan Nasional UGM. Sejak tahun 1987 mengajar di MKU dan tahun 2003 pindah di D-2 PGSD FIP UNY.

Abstrak

Semenjak tidak diberikannya **pendidikan budi pekerti** pada setiap anak usia dini, dan digantikan dengan pendidikan agama, moral Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang disederhanakan dan kurang menekankan pada aspek psikomotor perilaku anak untuk menghormati orang tua, lingkungan masyarakat dan lingkungan hidup sangat kurang, ada kecenderungan manusia Indonesia semakin jauh dari **nilai-nilai budi pekerti** yang bersumber dari hati nurani manusia. Terlebih masuknya ideologi liberal dan globalisasi telah memarginalisasikan manusia Indonesia yang semakin jauh dari kehidupan budi pekerti bersumber pada moral yang baik, dan mengakibatkan krisis total; KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) menggurita, ekonomi porak poranda, anak-anak muda melakukan kekerasan, pornografi, aborsi, pendidikan semakin terpuruk.

Melihat kenyataan di atas, generasi tua mulai sadar dan bernostalgia pada masa lalu, ketika pendidikan budi pekerti masih diberikan pada anak usia dini dan SD (sekolah dasar) yang pada waktu itu bisa menghasilkan peserta didik berlaku santun, menghargai orang tua dan mengasihi sesamanya.

Dengan dimunculkan kembali pendidikan budi pekerti yang diberikan pada anak usia dini (taman kanak-kanak) diharapkan memberi secercah harapan atau pencerahan bagi peserta didik sehingga menghasilkan generasi muda ideal atau menghasilkan warga negara *excellent* dengan para meter memiliki budi pekerti luhur dan loyalitas tinggi terhadap negara bangsa.

Kata kunci: Pendidikan budi pekerti

Pendahuluan

Pendidikan bertujuan bukan hanya membentuk manusia yang cerdas otaknya dan trampil dalam melaksanakan tugas, namun diharapkan menghasilkan manusia yang memiliki budi pekerti, bersumber dari hati nurani sehingga menghasilkan warga negara *excellent*. Oleh karena itu pendidikan tidak semata-mata mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga mentransfer nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Dengan transfer nilai budi pekerti bersifat universal, diharapkan peserta didik dapat menghargai kehidupan orang lain tercermin dalam tingkah laku serta aktualisasi diri, semenjak usia dini hingga kelak dewasa menjadi warga bangsa dan warga dunia yang baik di era globalisasi dan penuh tantangan.

Dalam kenyataannya manusia Indonesia (khususnya anak-anak remaja) di saat ini, kurang memperhatikan budi pekerti yang tercermin dari perilaku tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan seperti terjadi tawuran remaja, kurang menghormati orang tua, kurang mentaati norma-norma keluarga, hidup tidak disiplin. Terlebih pada masa globalisasi manusia Indonesia cenderung berperilaku keras, cepat, akseleratif dalam menyelesaikan sesuatu, dan budaya instan. Manusia dipaksa hidup seperti robot, selalu berada pada persaingan tinggi dengan sesamanya, hidup bagaikan roda berputar cepat, yang membuat manusia mengalami disorientasi meninggalkan norma-norma universal, menggunakan konsep *Machiavelli* (menghalalkan segala cara), mementingkan diri sendiri dan **tidak memiliki budi pekerti yang luhur**, tidak menghargai, mengasihi dan mencitai sesamanya (Haedar Nashir, 2007: 1).

Hidup semakin sulit, KKN menggurita, kriminalitas tinggi, dan tantangan ke depan yang berhubungan dengan pergeseran nilai semakin berat. Hidup di era transisi dan krisis multidimensional, hidup penuh berbagai kejanggalan di luar skenario yang diharapkan. Para birokrat bersama-sama pengusaha, dan eliti-eliti politik merampok uang rakyat, dan birokrasi telah menjadi seperti keranjang sampah. Pada saat yang sama bangsa-bangsa melakukan tindakan sinergis untuk kemajuan dan kejayaan negara bangsanya (*nation state*) sendiri-sendiri, namun bangsa Indonesia justru melakukan tindakan yang sebaliknya. Oleh karena itu sangat penting artinya **pendidikan budi pekerti** agar peran pendidikan sebagai *habitus* yang dapat merubah perilaku peserta didik menjadi manusia ideal dengan parameter memiliki sikap cinta tanah air, bertanggung jawab, cerdas, mampu memahami segala persoalan bangsa dan mengelolanya dengan arif.

Dengan diberikannya pendidikan **budi pekerti bagi anak usia dini** diharapkan dapat merubah perilaku anak, sehingga peserta didik jika sudah dewasa lebih bertanggung jawab dan menghargai sesamanya dan mampu menghadapi tantangan jaman yang cepat berubah. Disinilah pentingnya **nilai-nilai budi pekerti** yang berfungsi sebagai media transformasi manusia Indonesia agar lebih baik, memiliki keunggulan dan kecerdasan di berbagai bidang; baik kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan kinestetika, kecerdasan logis, musikal, linguistik, kecerdasan Spesial (Habibah, 2007: 1). Peran orang tua hanya sebatas memberi hal terbaik sesuai dengan jiwa jaman yang sedang dihadapi saat ini, agar kelak peserta didik (anak-anak usia dini) bagaikan anak panah lepas dari busurnya menentang, mengatasi permasalahannya sendiri, namun memiliki **keunggulan budi pekerti** yang baik dan luhur.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Menurut Slamet Suyanto dalam makalahnya “*Prinsip-prinsip Pembelajaran Anak usia dini*” mengatakan bahwa PAUD merupakan ilmu yang bersifat interdisipiner, meliputi; Pendidikan anak usia dini, Psikologi perkembangan anak, Biologi perkembangan, *Neuroscience*, Pendidikan jasmani, Pendidikan bahasa dan seni, dan pendidikan bidang studi termasuk **pendidikan budi pekerti** (Slamat Suyanto, 2006: 1). Sedang prinsip-prinsip dalam proses belajar mengajar dalam PAUD antara lain; *Appropriate* yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan tumbuh kembang jiwa anak, esensi bermain, holistik atau menyeluruh, terpadu atau *integrated*, bermakna, *long life skills* dan fleksibel

Anak usia dini mempunyai batasan dan pengertian beragam, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Secara tradisional pemahaman tentang anak usia dini sering disamakan dengan manusia dewasa dalam bentuk mini, masih polos dan belum mampu berfikir luas. Akibatnya anak usia dini sering diperlakukan sebagai orang dewasa kecil. Namun dalam perkembangan kemudian, ternyata anak usia dini berbeda dengan orang dewasa, sehingga diperlukan pendidikan secara khusus bagi anak usia dini sesuai dengan pertumbuhan fisik, emosional, kejiwaan dan **budi pekertinya** (Sofia Hartati, 2005: 7).

Anak usia dini sedang dalam pertumbuhan baik fisik dan mentalnya. Pertumbuhan saraf otaknya dimulai sejak dalam kandungan, dan ketika lahir sel saraf otak terus berkembang. Teori mengatakan, sampai usia 4 tahun 50% kecerdasan telah tercapai, dan 80% kecerdasan tercapai pada usia 8 tahun (Slamet Suyanto, 2005: 7).

Anak usia dini mengalami perkembangan fisik dan motorik, tak kecuali perkembangan kepribadian, watak, emosional, intelektual, bahasa, **budi pekerti**, dan moralnya yang bertumbuh dengan pesat. Oleh karena itu usia dini disebut sebagai **golden age** (usia 0-8 tahun). Oleh karena itu jika menghendaki bangsa yang cerdas, dan **berbudi pekerti luhur** (bermoral baik) pendidikan harus dimulai sejak usia dini.

Dalam usaha mentransfer nilai-nilai budi pekerti dapat digunakan **pendekatan dan metode** pembelajaran yang tepat sesuai dengan tumbuh kembang jiwa anak usia dini. Menurut Habibah (Habibah, 2007: 1) dalam sosialisasi pendidikan **budi pekerti** dapat digunakan pendekatan **indoktrinasi, klasifikasi nilai, keteladanan, dan perilaku guru**. Keempat pendekatan tersebut di atas diharapkan dapat diterapkan sesuai dengan situasi kondisi serta dilakukan secara holistik sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. Pendekatan di atas juga diharapkan guru mengetahui karakteristik siswa maupun kondisi kelas, dan seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan psikologi pendidikan sehingga kelas kondusif untuk pembelajaran **budi pekerti** (Sri Rumini, 1995: 19-20).

Pendekatan indoktrinasi dengan cara memberi hadiah atau hukuman, peringatan, dan pengendalian fisik. Sedang pendekatan klasifikasi nilai, dengan cara penalaran dan ketrampilan. Pendekatan keteladanan dengan cara disiplin, tanggung jawab, empati, dan pendekatan pembiasaan dengan cara perilaku seperti berdoa, berterima kasih. Pendekatan habitus diharapkan dapat merubah perilaku budi pekerti anak usia dini (Ambarwati, 2007: 1).

Sedang dalam mensosialisasikan nilai-nilai budi pekerti dapat digunakan metode bercerita (mendongeng), baik secara langsung, menggunakan ilustrasi, menggunakan papan panel, media boneka, Audio visual, Sosio drama. Metode bercerita khususnya menggunakan “dongeng” sangatlah menarik karena alur cerita, tujuan cerita, puncak

cerita dan akhir cerita dapat direncanakan sehingga tujuan pembelajaran budi pekerti lebih terarah dan terfokus untuk membentuk budi pekerti yang baik. Metode lain yang bisa digunakan antara lain; metode karya wisata, bermain yang berkaitan dengan menggunakan media seni rupa, seni musik sekaligus sebagai sarana untuk dapat membentuk perkembangan emosi dan kepribadian yang bermuatan budi pekerti. Jadi pendidikan budi pekerti harus dilakukan dengan pendekatan holistik dan terfokus untuk membentuk warga negara yang baik

Budi pekerti bersumber dari hati nurani dan moral

Budi pekerti pada hakekatnya adalah hasil perbuatan tingkah laku manusia yang baik, luhur, normatif bersumber dari hati nurani manusia terdalam. Hasil perbuatan budi pekerti bersifat universal untuk menghormati orang tua, sesamanya yang menghasilkan tingkahlaku untuk membuat kehidupan dalam keluarga, masyarakat menjadi semakin harmonis dan menghargai kehidupan kemanusiaan bersumber dari moral manusia. **Budi Pekerti** lebih menonjolkan hasil olah budi yang diaktualisasikan dalam tingkah laku lahiriah, sedang dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah "*Subasito*" yang lebih menekankan pada perbuatan lahiriah terhadap orang lebih tua sebagai wujud penghormatan. Jadi budi pekerti semacam aturan normatif tidak tertulis, ada dalam masyarakat dan dipelihara untuk penghormatan terhadap orang tua dan penghargaan terhadap sesama manusia.

Sedang moral berasal dari bahasa latin *mores*, yang artinya adat istiadat, kebiasaan atau cara hidup. Kata *mores* mempunyai sinonim *mos*, *moris*, *manner* *mores* atau *manners*, *morals*. Dalam bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib hati nurani yang membimbing tingkahlaku batin dalam hidup. Kata moral sama dengan istilah etika yang berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yaitu suatu kebiasaan adat istiadat. Secara etimologis etika adalah ajaran tentang baik dan buruk, yang diterima umum tentang sikap dan perbuatan. Pada hakekatnya moral adalah ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas, sedang etika lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan pada suatu profesi (Budi Istanto, 2007; 4). Namun ada pengertian lain etika mempelajari kebiasaan manusia yang telah disepakati bersama seperti; cara berpakaian, tatakrama. Dengan demikian keduanya mempunyai pengertian yang sama yaitu kebiasaan yang harus dipatuhi (Hendrowibowo, 2007: 84).

Moral selalu mengacu pada baik buruk manusia, sehingga moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari kebaikan manusia. Norma moral dipakai sebagai tolok ukur segi kebaikan manusia. Menurut Magnis Suseno yang dikutip Hendrowibowo; moral adalah sikap hati yang terungkap dalam sikap lahiriah. Moralitas terjadi jika seseorang mengambil sikap yang baik, karena ia sadar akan tanggungjawabnya sebagai manusia. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik sesuai dengan nurani (Hendrowibowo, 2007: 85).

Pendidikan Budi pekerti

Istilah pendidikan berasal dari kata *paedagogi*, dalam bahasa Yunani *pae* artinya anak dan *ego* artinya aku membimbing. Secara harafiah pendidikan berarti aku membimbing anak, sedang tugas pembimbing adalah membimbing anak agar menjadi dewasa. Secara singkat Driyarkara yang dikutip oleh Istiqomah mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui

bimbingan atau pengajaran dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila dan dinamis (Istiqomah, 203: 7). Sedang hakekat **budi pekerti** bersumber dari nurani dan moral, adalah norma-norma tingkah laku manusia yang harus dan wajib dilakukan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam mensosialisasikan nilai **budi pekerti** perlu adanya komitmen para elit politik, tokoh masyarakat, guru, *stakeholders* pendidikan budi pekerti, dan seluruh masyarakat. Sosialisasi Pendidikan budi pekerti harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:

“Pendidikan **budi pekerti** adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara komperhensif, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya. Sosialisasi pendidikan **budi pekerti** perlu diadakan bagi kepala sekolah, guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan komunitas pemimpin yang merupakan esensial utama. Perlu perhatian terhadap latar belakang murid yang terlibat dalam proses kehidupan **pendidikan budi pekerti**. Perhatian pendidikan budi pekerti harus berlangsung cukup lama, dan pembelajaran budi pekerti harus diintegrasikan dalam kurikulum secara praksis di sekolah dan masyarakat (Setyo Raharjo, 2005).

Pendidikan **budi pekerti** harus direncanakan secara matang oleh *stakeholders* , sebagai *think-tank*, baik para pakar **Pendidikan budi pekerti atau pakar moral** seperti rohaniawan (tokoh agama), pemimpin non formal (tokoh masyarakat), kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid. Pendidikan **budi pekerti** ini harus memperhatikan nilai-nilai secara holistik dan universal. Keberhasilan pendidikan **budi pekerti** dengan keluaran menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan kompetensi sosial yang memiliki budi pekerti luhur dan dinamis sehingga menghasilkan warga negara yang baik (*good citizen*).

Dalam mewujudkan kehidupan **berbudi pekerti luhur** bagi anak usia dini perlu strategi perjuangan secara struktural dan kultural secara bersama-sama. Strategi struktural dalam arti politis, perbaikan struktural ini merupakan sarana yang paling efektif adalah melalui kurikulum pendidikan anak usia dini (PAUD) dan SD. Melalui lembaga pendidikan formal aspirasi masyarakat tentang **pendidikan budi pekerti** dapat disalurkan, dan nilai-nilai budi pekerti dapat diperjuangkan sebagai masukan dari masyarakat kepada pemerintah khususnya Depdikbud. Input dari masyarakat kepada pemerintah akan dijabarkan dalam bentuk kebijaksanaan atau undang-undang yang mewajibkan dilaksanakannya **pendidikan budi pekerti** bagi anak-anak usia dini yang didukung dana dari pemerintah. Sebagaimana dikatakan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar **pendidikan budi pekerti** dimasukkan dalam muatan lokal pendidikan dan didanai oleh Pemerintah. Hal ini berkaitan erat dengan semakin merosotnya budi pekerti, terutama di kalangan anak muda (Kompas, 15 Maret 2007: D). Sementara secara **kultural** memerlukan perjuangan yang panjang. Perjuangan membangun mentalitas bangsa yang berbasis nilai-nilai **budi pekerti** melalui penghormatan kepada orang tua dan bersumber dari nilai moral, harus diawali dari individu yang mengutamakan kehidupan, menjunjung nilai-nilai **budi pekerti**, disemaikan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolahan dan masyarakat luas.

Dalam mensosialisasikan nilai-nilai budi pekerti diperlukan guru, guru harus bersedia bersinergis dengan orang tua anak didik untuk mewujudkan kehidupan budi pekerti yang baik dengan menggunakan konsep *gold three angle* yaitu kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah dan penyandang dana. Perguruan tinggi mengadakan R dan D (*research & development*) dalam bidang pendidikan budi pekerti yang telah diuji cobakan dan berhasil. Depdikbud termasuk Pejabat Kanwil Depdikbud memberi *good will* (kemudahan) melalui peraturan pemerintah dalam mensosialisasikan nilai-nilai budi pekerti. Penyandang dana bisa dari *grand* (hadiah) atau donatur, hibah untuk mendanai riset dan sosialisasi nilai budi pekerti sehingga pendidikan budi pekerti bisa berjalan dengan baik seperti harapan.

Hasil penelitian perguruan tinggi tentang **budi pekerti** diharapkan menambah alternatif pemerintah yang dapat dipilih sebelum menentukan kebijakan dilaksanakan, selain itu tenaga dosen bersama mahasiswa dapat mendampingi masyarakat, sehingga perguruan tinggi dapat menjadi solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan pendidikan khususnya dalam memecahkan **persoalan budi pekerti anak usia dini**. Mereka bisa bersinergis dan tidak saling menyalahkan, pakar-pakar perguruan tinggi (khususnya pakar PAUD) dapat memberi masukan pada pemerintah dan sekaligus terjun langsung ke masyarakat dengan langkah kongkrit untuk **memperbaiki budi pekerti** peserta didik (Victor Purba, Kompas, Kamis, 22 Maret 2007; 12).

Jadi nilai budi pekerti dibawa seorang guru yang meyakini kebenaran budi pekerti sebagai ideologi ideal dan harus ditanamkan pada setiap hati (personal, individu) khususnya anak usia dini agar suatu hari nanti kehidupan bangsa yang menjunjung nilai-nilai budi pekerti dapat terwujud.

Dengan adanya benih nilai-nilai **budi pekerti** yang sudah disemaikan dalam keluarga, diajarkan di sekolah oleh guru dan masyarakat diharapkan setiap personal dapat mempraktikkan nilai budi pekerti dalam totalitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Modal nilai budi pekerti yang sudah ada dalam personal merupakan lahan yang subur bagi anak-anak usia dini untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang ideal. Terlebih lagi dalam pembelajaran dan sosialisasi pendidikan budi pekerti dapat dimanfaatkan konsep *learning to do, learning to be, learning to know, learning to live together*. Apalagi guru, orang tua murid, pemuka agama, pemuka masyarakat, elit politik, dan pejabat (pemimpin nasional) memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang berbudi pekerti luhur dengan konsep "*Ingarso sung tuladho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani*".

Pentingnya Sosialisasi nilai-nilai Budi pekerti

Dalam usaha mensosialisasikan nilai-nilai budi pekerti peserta didik (anak usia dini) sering mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan bagaimana harus berpikir, berkeyakinan dan bertingkah laku sebab apa yang dimengerti belum tentu sama dengan apa yang terjadi dalam masyarakat yang penuh konflik nilai. Televisi dan koran memberikan informasi yang berbeda dengan apa yang ada dalam keluarga maupun yang terjadi di masyarakat, sehingga hal ini sangat membingungkan peserta didik untuk menentukan pilihan nilai. Peserta didik (anak usia dini) sulit menentukan pilihan nilai yang terbaik, akibat dari tekanan dan propaganda teman sebaya. Dalam hal ini jika

pendidikan nilai **budi pekerti** ingin berhasil perlu mengajarkan secara langsung kepada anak usia dini dengan memberi keteladanan yang nyata. (Parjono, 2005: 1).

Transfer nilai budi pekerti kepada anak usia dini juga dapat digunakan dengan metode secara moderat karena di dunia ini tidak ada sistem yang sempurna, oleh karena itu peserta didik harus mengolah dan memiliki normanya sendiri. Guru dan orang tua hanya memberikan norma-norma yang sudah dibakukan dan mengajarkannya, sehingga peserta didik tidak merasa disitir dan digurui, mereka dibiarkan untuk bereksprimen, berdialog dengan dirinya atau merenungkan ajaran moral yang telah diterimanya, sehingga peserta didik menemukan apa yang dikehendakinya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai substansial.

Cara lain untuk memindahkan nilai budi pekerti dengan cara memodelkan, dengan asumsi bahwa guru (*panutan*) menampilkan diri dengan nilai tertentu sebagai model yang mengesankan, maka harapannya generasi muda akan meniru model yang diideolakan. Namun demikian model-model tingkah laku dan sikap yang berhubungan dengan nilai budi pekerti sering ditampilkan oleh banyak orang yang berbeda-beda sehingga anak bisa mengalami kebingungan dalam menentukan nilai budi pekerti. Oleh karena itu orang dewasa harus mengajar nilai-nilai budi pekerti secara berulang-ulang kepada anak-anak dan membicarakannya pada waktu dirumah, dalam perjalanan, waktu ditempat tidur dan pada waktu bangun pagi. Ajaran budi pekerti harus diikatkan sebagai tanda pada tangan dan dahi, dan menuliskan pada tiang pintu dan pintu gerbang. Atau seluruh kehidupan dan aktivitas serta lingkungan hidup dijadikan media untuk sosialisasi nilai-nilai budi pekerti (LAI, 2003: 200.).

Prinsip pembelajaran nilai budi pekerti merupakan pembelajaran yang efektif yang harus menempatkan peserta didik sebagai pelaku budi pekerti yang *das sollen*, mereka harus diberi kesempatan untuk belajar secara aktif baik fisik maupun mental. Aktif secara mental bila peserta didik aktif berfikir dengan menggunakan pengetahuannya untuk mempersepsikan pengalaman yang baru disamping secara fisik dapat diamati keterlibatannya dalam belajar sehingga nilai-nilai budi pekerti menjadi bagian dari hidupnya.

Dalam pembelajaran nilai budi pekerti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pembelajaran nilai dapat efektif yaitu perbuatan dan pembiasaan. Oleh karena dengan perbuatan anak didik (anak usia dini) dapat secara langsung melakukan pengulangan perbuatan agar menjadi kebiasaan. Atau nilai budi pekerti yang baik menjadi budaya mereka.

Interaksi antara panutan yang memberi keteladanan pada peserta didik dan kondisi lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran nilai budi pekerti sangat menguntungkan untuk transfer nilai melalui saling membagi dalam pengalaman. Guru yang baik juga dapat mengerti perasaan, pemahaman, jalan pikiran peserta didik dan mereka diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan sekaligus dapat memberi jalan keluar dalam pergumulan pemilihan nilai budi pekerti yang ada tanpa mengindoktrinasi.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap materi pembelajaran nilai, peserta didik dapat memilih berbagai alternatif nilai yang ada dan mengamalkan sebagai ujud aktualisasi diri. Guru sebagai panutan yang memberi hidupnya bagi peserta didik diharapkan dapat merefleksikan diri melalui perasaan dan pikirannya setelah merenung dan mendapat masukan sehingga dapat mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengamalan nilai budi pekerti yang telah diterima dan dilakukan siswanya.

Ada dua lembaga yang berperan mengajarkan pendidikan budi pekerti yaitu lembaga formal dan non formal, secara formal pendidikan budi pekerti dilakukan oleh sekolah dan non formal oleh keluarga dan masyarakat. Pendidikan budi pekerti melalui keluarga, peran orang tua sangat dominan dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti sejak usia dini sesuai dengan tumbuh kembang jiwa anak. Anak-anak akan patuh pada perintah orang tuanya untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan pendidikan budi pekerti melalui masyarakat biasanya berupa norma sosial. Norma merupakan kaidah, aturan yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi warganya, agar kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib. Ada beberapa norma yang harus dipatuhi dalam masyarakat antara lain; norma kesopanan (**budi pekerti**), norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum. Norma di atas sangat membantu untuk mewujudkan **budi pekerti** yang baik.

Penutup

Pendidikan budi pekerti akan berhasil apabila, guru memberi stimulus agar anak didik memberi respon sesuai dengan keinginan pendidik, dan dengan stimulus, respon itu anak didik diberi *classical conditioning* untuk menciptakan kondisi belajar yang lebih kondusif. Agar tujuan pendidikan budi pekerti dapat tercapai, guru dapat memberi hadiah kepada anak didik yang berhasil dan hukuman bagi yang gagal, namun dalam koridor memanusiakan manusia. Proses stimulus dan respon dalam pendidikan budi pekerti harus diberikan terus menerus dan terprogram, sehingga anak usia dini akan memiliki *habitus* (pendidikan yang merubah perilaku) dalam mewujudkan Indonesia baru.

Dalam melaksanakan pendidikan budi pekerti untuk mewujudkan Indonesia baru, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas peserta didik untuk membuat mereka sadar akan keberadaannya di dunia ini. Prinsip humanisme harus dijunjung secara otentik, bukan humanitarian. Prinsip humanisme yang ada dalam UU Sisdiknas adalah untuk mencapai manusia bermoral, bermartabat, berbudi pekerti luhur. Sedangkan untuk melaksanakannya secara kritis, dialogis dan menghindari kekerasan dan mengedepankan nilai-nilai budi pekerti yang luhur.

Pendidikan budi pekerti diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan sosial sehingga menjadi warga negara yang baik (*good care* atau *good citizen*) dengan ciri-cirinya antara lain: berani mengambil sikap positif untuk menegakkan norma-norma sosial, aturan hukum dan nilai-nilai budi pekerti demi masa depan bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesatuan, kebangsaan, kebhinekaan, multikultural, nasionalisme, demokrasi dan demokratisasi yang bersumber pada nilai budi pekerti dan moral bangsa.

Arah kebijaksanaan pendidikan budi pekerti adalah untuk mewujudkan masyarakat sipil dengan parameter masyarakat lebih baik; demokratis, anti kekerasan, berbudi pekerti luhur, bermoral; masyarakat mendapat porsi partisipasi lebih luas, serta adanya landasan kepastian hukum, mengedepankan nilai-nilai egalitarian, nilai keadilan, menghargai HAM, penegakan hukum, menghargai perbedaan SARA dalam kesatuan bangsa. Menjunjung tinggi nilai-nilai religius dengan dilandasi pengamalan nilai-nilai moral Pancasila, yang diaktualisasikan baik secara obyektif dan subyektif sebagai paradigmanya. Budi pekerti luhur harus menjadi bagian hidup dalam kehidupan sehari-hari akan sangat mendukung suasana yang kondusif untuk pelaksanaan pendidikan budi pekerti dan mewujudkan Indonesia baru yang lebih ideal (*Beautiful Country* artinya

negeri yang indah, tanpa kekerasan, dan masyarakatnya hidup dalam kedamaian, *gemah ripah loh jinawi, tata tertrem karta raharjo*, dalam koridor *Civil Society*)

Diberikannya pendidikan budi pekerti pada anak usia dini merupakan salah satu alternatif solusi penyelesaian untuk mengantisipasi kenakalan remaja, sex bebas, pornografi, kekerasan, KKN. Dengan tersosialisasikan pendidikan budi pekerti diharapkan peserta didik dapat memahami, menganalisis, menjawab masalah-masalah yang dihadapi bangsa, dan dapat membangun kehidupan budi pekerti luhur dan moral bangsa secara berkesinambungan, konsisten yang bersumber pada nilai-nilai budi pekerti dan moral bangsa sehingga cita-cita bangsa dan tujuan nasional bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, dkk. *Pendekatan dan Metode Pengembangan Moral Anak Usia Dini*. Yogyakarta; FIP UNY. (makalah).

Budi Istanto, 2007. *Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Generasi Penerus*. Yogyakarta: FIP. UNY.

Habibah, dkk. 2007. *Metode Pengembangan Moral Anak Pra Sekolah*. Yogyakarta: FIP UNY. (makalah).

Hendrowibow, I. 2007. "Pendidikan Moral", Majalah *Dinamika*, FIP, UNY.

LAI, 2003, *Alkitab*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

Kaelan, 2001. *Pendidikan Moral Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

Parjono. 2005. *Pendidikan Nilai-nilai Moral*. Yogyakarta: MKU, UNY.

Romi Toufiqoh, 2007. *Pentingnya Pendidikan Moral*, Yogyakarta: FBS, UNY.

Slamet Suyanto, 2005. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Depdikbud, Dirjendikti. Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi.

-----, 2006. "Prinsip Pembelajaran Anak Usia Dini", *Disampaikan pada Saresehan Pengembangan Pembelajaran di SD dan TK Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar FIP*. Puslit PAUD UNY.

Setyo Raharjo, 2005. *Pendidikan Multi Kultural*. Yogyakarta: FIP, UNY.

Sofia Hartati. 2005. *Perekembangan Belajar Pada Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Dirjendikti Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.

Sri Rumini, dkk. 1995. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Sunarso, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegara*, Yogyakarta: UPT MKU UNY

Umar Said, 2007. *Google Pendidikan Moral*.

Surat Kabar

Haedhar Nashir, "Leptop Dewan". *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 23 Maret 2007.

Purnomo, "IPDN Bukan Pusat Pelatihan Binatang", *Kedaulatan Rakyat*, 11 April 2007.

Redaktor, "Tajuk Rencana", *Kedaulatan Rakyat*, 11 April 2007.

Sri Sultan Hamengkubuwono X, "Budi Pekerti Masuk Muatan Lokal", *Kompas*, 15 Maret 2007.

Victor Purba, "UI Siap Melangkah Lebih Kongkrit", *Kompas*, Jakarta, 23 Maret 2007

Biodata Penulis:

Sigit Dwi Kusrahmadi, lahir di Yogyakarta, 27 Juni 1957, menyelesaikan S-1 di Fakultas Sastra Jurusan Sejarah UGM, dan menyelesaikan S-2 Sospol Ketahanan Nasional UGM. Sejak tahun 1987 mengajar di MKU dan tahun 2003 pindah di D-2 PGSD (PDPS) FIP UNY.